

OJK: Asuransi Tak Patuhi Aturan Terbaru Dilarang Pasarkan PAYDI

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa setiap perusahaan asuransi pemasar produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau *unit link* harus mematuhi setiap ketentuan terbaru. Jika tidak, perusahaan asuransi dilarang untuk memasarkan produk tersebut.

Oleh Prisma Ardianto

OJK telah menerbitkan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 5 Tahun 2022 (SEOJK PAYDI) yang telah berlaku mulai 14 Maret 2022. Dalam regulasi tersebut, ada sejumlah ketentuan yang langsung berlaku sejak diterbitkan dan berlaku setelah 12 bulan diterbitkan. "SEOJK ini memang ada ketentuan yang harus diterapkan dan berlaku setelah 12 bulan. Untuk ketentuan yang langsung berlaku, maka perusahaan harus menyesuaikan, kalau tidak bisa menyesuaikan, perusahaan asuransi tidak boleh memasarkan produk karena tidak bisa menyesuaikan aturan ini," kata Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Nurhasan, akhir pekan lalu.

Dalam pemaparannya, ada sejumlah penyesuaian yang harus dilakukan perusahaan asuransi terhadap portofolio *unit link existing* sejak SEOJK PAYDI berlaku. Di antaranya adalah pemilihan *waiting period* bagi pemegang polis dan ketentuan mengenai cuti premi pada PAYDI yang hanya dapat diberlakukan atas permintaan pemegang polis. Lalu berbagai ketentuan umum pengelolaan aset dan liabilitas PAYDI, termasuk strategi investasi berupa jenis strategi investasi, penamaan subdana, serta evaluasi kinerja investasi secara berkala. Perusahaan juga harus segera menyiapkan publikasi informasi nilai aktiva bersih (NAB) dan pelaporan perkembangan nilai tunai.

Sementara itu, sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi perusahaan dalam 12 bulan sejak SEOJK PAYDI diterbitkan atau pada 14 Maret 2023 memuat di antaranya tentang kebutuhan tenaga pengelola investasi, sistem

informasi yang memadai, dan sumber daya manusia (SDM) pendukung pengelolaan PAYDI.

Dari aspek desain PAYDI, penerapan uang pertanggungan minimum Rp 100 juta untuk polis rupiah dan Rp 500 juta untuk valuta asing (valas). Perusahaan pun dilarang memberikan garansi, target tertentu, dan/atau sejenisnya atas hasil investasi dan/atau nilai tunai. Termasuk mengenai sejumlah ketentuan polis dan fitur tambahan PAYDI. Untuk sisi pengelolaan aset dan liabilitas, dalam 12 bulan sejak

kan tahun ke-11 dan seterusnya berlaku 100% dari premi berkala.

Perusahaan juga harus mengalokasikan bagian premi untuk pembentukan nilai tunai. Hal tersebut menjadi bagian mengantisipasi nilai tunai pemegang polis habis tergerus risiko pasar maupun risiko lain, seperti yang terjadi sebelumnya hanya 15% nilai tunai di tahun ke-5.

Lebih lanjut, pada 12 bulan sejak SEOJK PAYDI berlaku, perusahaan harus menyesuaikan penempatan investasi dan menghitung

(b) pemahaman calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai PAYDI yang dipasarkan; dan (c) kecukupan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan untuk proses *underwriting*.

Selanjutnya, premi atau kontribusi hanya dapat diterima oleh apabila perusahaan telah memastikan permohonan asuransi untuk tertanggung atau peserta diterima berdasarkan ketentuan *underwriting*. Memiliki dokumentasi proses pemasaran PAYDI dalam bentuk rekaman video dan/atau audio sebagai bukti jika nantinya terjadi perselisihan.

Perusahaan asuransi juga mesti memastikan PAYDI dalam mata uang asing hanya dapat dipilih oleh pemegang polis yang telah memiliki pemahaman atas risiko nilai tukar mata uang asing yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening bank dalam mata uang asing. "Kita tahu literasi di asuransi dibandingkan lainnya itu masih rendah, terakhir kali 19%. Terkait untuk menghindari risiko pengetahuan nilai tukar, maka dibuat juga penempatan subdana di luar negeri hanya diperuntukan bagi mata uang asing," imbuh Nurhasan.

Berikutnya, perusahaan asuransi wajib menerapkan pelaksanaan konfirmasi (*welcoming call*) kepada pemegang polis dan memenuhi ketentuan mengenai saluran pemasaran. Iklan pemasaran PAYDI pun mesti akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, serta menekankan proteksi dan mengandung informasi yang beresiko.

Terakhir, perusahaan asuransi wajib memuat ringkasan produk dan layanan berisi 21 informasi. Termasuk didalamnya adalah ilustrasi hasil investasi yang dibuat dengan menggunakan skenario hasil investasi negatif, nol, dan positif, paling tinggi 5% untuk jenis pasar uang, sebesar 7% untuk pendapatan tetap, dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta;

“SEOJK ini memang ada ketentuan yang harus diterapkan dan berlaku setelah 12 bulan. Untuk ketentuan yang langsung berlaku, maka perusahaan harus menyesuaikan, kalau tidak bisa menyesuaikan, perusahaan asuransi tidak boleh memasarkan produk karena tidak bisa menyesuaikan aturan ini.”

Nurhasan

Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK

SEOJK PAYDI diterbitkan perusahaan asuransi harus memastikan kecukupan dan alokasi premi. Dalam hal ini, antara lain diatur mengenai batas minimum premi dasar yang dialokasikan untuk pembentukan subdana.

Tahun ke-1 sampai tahun ke-3 adalah 60% dari premi dasar berkala. Tahun ke-4 sampai tahun ke-6 mencakup 80% dari premi dasar berkala. Kemudian tahun ke-7 sampai tahun ke-10 yaitu 95% dari premi dasar berkala. Sedangkan

NAB. Perusahaan asuransi juga mesti menghitung biaya yang dapat dibebankan selama *free look*, tidak termasuk biaya asuransi. Hal lain adalah membuat perjanjian penggunaan layanan bank kustodian.

Aspek Pemasaran

Di sisi lain dari aspek pemasaran, perusahaan harus memastikan (a) kesesuaian PAYDI dan subdana dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta;



Istimedia

FWD Community Ladies Talk

Dari kiri ke kanan, Head of Marketing and New Business Model FWD Insurance Widaningrum, Chief Governance Officer dan Direktur Kepatuhan FWD Insurance Maria Magdalena, Chief Bancassurance Officer FWD Insurance Rosidar Suhaid, dan Chief Financial Officer FWD Insurance Desy Widjaya saat acara FWD Community Ladies Talk, pekan lalu. FWD Insurance kembali meluncurkan program literasi keuangan FWD Community Ladies Talk bersama komunitas bloggers, ditandai dengan dilaksanakannya acara Women Inspirational Talk: Merayakan Hidup Penuh Percaya Diri bersama FWD Insurance. Acara ini menutup serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati hari perempuan internasional pada 8 Maret lalu, dimana FWD Insurance juga telah kembali meluncurkan program pengembangan perempuan HEROic untuk karyawan, serta turut serta dalam dialog bersama Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) mengenai peran laki-laki untuk bisa berbagi ruang serta mendukung perempuan untuk berkembang.

Bank Raya Siap Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun

JAKARTA – PT Bank Raya Indonesia Tbk akan memenuhi aturan modal inti minimum Rp 3 triliun pada tahun ini, sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Direktur Utama Bank Raya Kaspar Situmorang mengatakan, pemenuhan modal inti menjadi salah satu strategi untuk mendorong kinerja perseroan pada tahun ini. Terlebih, bank bersandi saham AGRO ini juga optimis mencetak laba bersih. "Posisi modal kami CAR itu 20,24%, dengan modal Rp 2,46 triliun. Tahun ini sudah pasti kami menambah modal untuk *comply* POJK 12, sudah barang tentu kami akan *comply*," ungkap Kaspar, pekan lalu.

Berdasarkan laporan keuangan Bank Raya, modal inti perseroan sebesar Rp 2,08 triliun per akhir Desember 2021, dengan total ekuitas Rp 2,46 triliun. Untuk mencapai modal inti Rp 3 triliun, Kaspar menjelaskan pihaknya akan melakukan aksi korporasi, namun belum bersedia menyebutkan secara pasti kapan

akan dieksekusi.

Tahun lalu, perseroan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau *rights issue*. Melalui PMHMETD tersebut, pemegang saham telah menyerap secara optimal saham baru yang diterbitkan sebanyak 1.054.545.185 lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp 1.100 per lembar saham. Dengan harga pelaksanaan tersebut, perseroan telah menghimpun dana Rp 1,16 triliun yang digunakan sepenuhnya untuk modal kerja dalam rangka penyaluran kredit berbasis digital.

Dengan visi menjadi *The Best Digital Bank by Becoming House of Fintech and Home for Gig Economy*, Bank Raya terus mengembangkan ekosistem digital dengan target pasar *gig economy* melalui pendekatan komunitas. Salah satu wujud pengembangan ini adalah melalui kolaborasi dengan berbagai perusahaan teknologi finansial, dengan harapan kolaborasi tersebut akan menghasilkan pemetaan sektor unggulan

yang memanfaatkan layanan keuangan yang disediakan perusahaan-perusahaan *fintech*, di mana Bank Raya bisa mengambil peran penting sebagai penyedia layanan perbankan digital.

Selain itu, Bank Raya terus memperkuat infrastruktur teknologi agar dapat beroperasi sebagai bank digital secara penuh, khususnya dengan adopsi berbagai teknologi terkini dan kolaborasi erat dengan Grup BRI untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan ketat dalam industri perbankan Indonesia. Pada akhirnya, Bank Raya optimis menghadapi tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan baik.

Dengan demikian, dalam rangka menjalankan transformasi bisnis, perseroan terus melakukan berbagai peningkatan internal serta penguatan terhadap aspek sumber daya. Transformasi bisnis Bank Raya dari bisnis *legacy* menuju pengembangan bisnis kredit digital telah menyumbangkan pertumbuhan pada penyaluran kredit digital melalui aplikasi Pinang (Pinjaman Tenang). (mid)

Tingkatkan CASA, BNI Dorong Campus Financial Ecosystem

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memperkuat ekosistem kelembagaan untuk meningkatkan rasio dana murah atau *current account saving account* (CASA), guna menunjang pembiayaan lebih kompetitif di masa pemulihan ekonomi nasional tahun ini. Sebagai satu-satunya bank yang mendapat julukan Bank Kampus di Indonesia, BNI mendorong ekspansi program *Campus Financial Ecosystem*.

Per akhir 2021, dana pihak ketiga yang terhimpun dari universitas serta lembaga pendidikan mencapai Rp 12,01 triliun yang mayoritas berasal dari CASA. Dana tersebut terus meningkat seiring dengan ekspansi program-program BNI mengakuisisi beberapa kampus di Jawa dan Bali untuk masuk dalam program *Campus Financial Ecosystem*.

Adapun *Campus Financial Ecosystem* merupakan program yang akan BNI fokuskan dalam memberikan solusi keuangan lengkap berbasis digital, kepada nasabah lembaga universitas dan para civitas akademis kampus.

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto menyampaikan bahwa perseroan memiliki kerja sama sangat erat dengan banyak universitas di Indonesia. Kerja sama erat tersebut bahkan membuat BNI mendapat julukan sebagai Bank Kampus. "Julukan tersebut tidak asing bagi kita semua bahwa kita masih memiliki memori yang kuat, bahwa tempat pembayaran SPP mahasiswa di BNI, bahkan Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) ya di BNI," jelas dia dalam siaran pers,

Minggu (3/4).

Sejauh ini, cakupan layanan di dunia pendidikan perseroan mencapai 718 lembaga pendidikan. Pada umumnya, perseroan mengambil peran dalam memberikan solusi transaksi pembayaran uang kuliah hingga *cash management* universitas sehingga memberi peluang pada BNI untuk meningkatkan dana masyarakat khususnya CASA. "*Campus Financial Ecosystem* akan terus kami perkuat. Ini juga merupakan salah satu program kami untuk meningkatkan DPK khususnya CASA sambil membentuk ekosistem kelembagaan yang berbasis pada solusi digital yang membantu universitas dan civitas akademis," jelas dia.

Sis Apik juga menjelaskan, BNI telah menjangkau beberapa universitas seperti UI, ITB, dan terakhir Unud. BNI juga telah bekerja sama untuk Pelaksanaan Ujian Tulis berbasis Komputer lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi yang terdaftar hingga 125 kampus. BNI ikut bekerja sama dalam hal Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Di samping itu, BNI memiliki beberapa program seperti layanan transaksi perbankan digital secara *customized* dengan menerapkan *closed loop transaction* di lingkungan kampus, yang dapat dimanfaatkan seluruh civitas akademika di setiap universitas.

"Kami juga terus mencari potensi untuk penyaluran BNI Fleksi Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana S2/S3, Magang Bersertifikat, Program Early

Recruitment Program dan Pemberdayaan UMKM Mitra Binaan universitas melalui Program BNI Edupreneur," imbuh dia.

Dukung Diaspora di Korsel

Sementara itu, BNI mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk *go global* dan diaspora di luar negeri. Kali ini perseroan memberikan pembiayaan berupa modal usaha bagi diaspora yang memiliki usaha kuliner di Korea Selatan (Korsel).

Direktur *Treasury* dan Internasional BNI Henry



Sis A Wijayanto

Panjaitan menyatakan, kesuksesan bisnis kuliner Indonesia ini membuat para diaspora di Korsel tergugah untuk mengembangkan

bisnis kuliner supaya lebih besar lagi. Dari yang awalnya hanya memiliki satu restoran, saat ini mereka berani membuka cabang di beberapa kota yang tersebar di Korsel. Menurut dia, potensi usaha kuliner bagi diaspora Indonesia ini menjadi perhatian bagi BNI Cabang Seoul dan hadir membantu pembiayaan untuk mengembangkan usaha kuliner di Korsel.

"Saat ini, kami melalui BNI Cabang Seoul hadir membantu pembiayaan modal usaha diaspora di Korea Selatan. Diaspora *loan* sebagai modal usaha dan ekspor produk serta

rempah dari Indonesia yang sulit ditemukan di Korea Selatan, selain itu memberikan pendampingan usaha berupa seminar literasi keuangan dan membantu perluasan pasar," jelas Henry dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/4).

Dia mengharapkan, para diaspora bisa lebih terbantu dalam mengembangkan bisnisnya dan juga lebih percaya diri lagi bersaing dengan restoran-restoran negara lain di Korea Selatan, seperti restoran Thailand atau Vietnam.

Bermodal nasi goreng, Ani sang pebisnis wanita mampu menarik perhatian

warga lokal untuk mengenal, menciptakan, dan bahkan mencintai sajian-sajian khas Nusantara. Ani adalah warga Indonesia yang tinggal di Korea Selatan (diaspora) dan memiliki usaha kuliner Indonesia dengan nama Delisha Café. Bahkan, dia ini telah sukses memiliki dua cabang di Kota Gyeongju dan Gumi yang menyajikan bermacam menu Indonesia dengan sajian andalan nasi goreng. Delisha Café berlokasi di Gyeongbuk Province, Gyeongju city, Dongseong-ro, 143-2.

Dia menuturkan kuliner Indonesia ternyata sangat menggugah selera dan se-

makin diminati, tidak hanya untuk orang Indonesia yang tinggal di Korea Selatan, tapi orang lokal Korsel. "Bahkan, makanan kesukaan itu justru makanan yang khas sekali terutama rendang dan nasi gorengnya," tutur Ani.

Sebagai UMKM Binaan BNI, Ani mengapresiasi semua dukungan dari BNI baik program pelatihan, pembinaan dan solusi perbankan. "Kemudahan pembayaran ke Indonesia jaringan nasabah BNI Xpora sangat membantu kami dalam mengakses produk-produk Indonesia untuk kami pasarkan di Delisha Café," sebut dia. (mid/th)

Nusantara Infrastructure
PT Nusantara Infrastructure Tbk
(Perseroan)

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 pukul 14.00 WIB – selesai.

Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Para Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah yang sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat POJK 15, serta usulan tersebut harus telah diterima oleh Direksi Perseroan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022.

Sesuai dengan POJK 15 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikdiknya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022.

Jakarta, 4 April 2022
DIREKSI
PT Nusantara Infrastructure Tbk

PENGUMUMAN NEGOSIASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK 9/2018"), dengan ini kami sampaikan bahwa PT Hanwha Life Insurance Indonesia ("Calon Pengendali Baru") sedang melaksanakan proses negosiasi atas rencana pengambilalihan PT Lippo General Insurance Tbk ("Perseroan") dengan PT Inti Anugerah Pratama ("IAP") dan PT Star Pacific Tbk ("LPLI").

Sehubungan dengan proses negosiasi tersebut, Calon Pengendali Baru telah menandatangani *Conditional Sale and Purchase Agreement* (Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat) dengan IAP dan *Conditional Sale and Purchase Agreement* (Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat) dengan LPLI, keduanya pada tanggal 1 April 2022 ("Perjanjian-Perjanjian Jual Beli Bersyarat"), berdasarkan mana Calon Pengendali Baru berencana untuk membeli: (i) sejumlah saham di Perseroan milik IAP yang mewakili 42,79% dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan (ii) sejumlah saham di Perseroan milik LPLI yang mewakili 4,90% dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan – dimana seluruhnya merupakan 47,69% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ("Rencana Pengambilalihan").

Tujuan Rencana Pengambilalihan adalah untuk mengembangkan skala bisnis asuransi Calon Pengendali Baru di Indonesia. Penyelesaian Rencana Pengambilalihan tunduk pada pemenuhan syarat dan kondisi yang disepakati dalam Perjanjian-Perjanjian Jual Beli Bersyarat, termasuk namun tidak terbatas atas diperolehnya:

(i) persetujuan dari OJK atas rencana jual beli saham dalam Perseroan sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan; dan (ii) hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Calon Pengendali Baru dari OJK untuk menjadi pemegang saham pengendali Perseroan; sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang perusahaan asuransi.

Pada tanggal pengumuman ini, Calon Pengendali Baru tidak memiliki saham dalam Perseroan. Apabila Rencana Pengambilalihan diselesaikan, maka Calon Pengendali Baru akan menjadi pengendali baru Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 9/2018.

Dalam melaksanakan Rencana Pengambilalihan, Calon Pengendali Baru akan memperhatikan dan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk POJK 9/2018 dan peraturan-peraturan mengenai perusahaan asuransi yang berlaku terhadap Perseroan dan Calon Pengendali Baru. Apabila Rencana Pengambilalihan telah selesai dilaksanakan, Calon Pengendali Baru akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai dengan ketentuan POJK 9/2018.

Calon Pengendali Baru merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa. Calon Pengendali Baru merupakan anak perusahaan dari Hanwha Life Insurance Co. Ltd, dimana Hanwha Life Insurance Co. Ltd. saat ini memiliki kepemilikan sebesar 99,61% di Calon Pengendali Baru.

Calon Pengendali Baru akan melakukan pengumuman-pengumuman lebih lanjut apabila terdapat perkembangan atas Rencana Pengambilalihan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 4 April 2022
PT Hanwha Life Insurance Indonesia
Alamat:
World Trade Centre 1, Lantai 12
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5081 6111
Email: corp.secretary@hanwhalife.co.id